

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN POLITIK TENTANG PEMILU 2024 TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL BINA LARAS SENTOSA II OLEH
KPU JAKARTA TIMUR**

Yusuf Christian Sigalingging

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Indonesia

Email Korespondensi: yusufchristian9898@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the effectiveness of the East Jakarta KPU's political education on the understanding of people with disabilities regarding the 2024 elections. The aim of this research is to determine the effectiveness of the KPU's political education in East Jakarta and to determine the understanding of political education carried out by the East Jakarta KPU for residents of the Bina Laras Harapan Sentosa social institution II. The research method used is a qualitative approach using an exploratory descriptive type of research. Data collection techniques used interviews and literature study. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used is the theory of program effectiveness and political education. The results of this research indicate that the socialization activities carried out by the East Jakarta KPU at PSBL II were effective if assessed using Campbell J.P.'s theory, which consists of 4 indicators, namely program success, target success, satisfaction with the program and achievement of overall goals.

Keywords: Effectiveness, Political education, East Jakarta KPU, PSBL II

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada efektifitas pendidikan politik KPU Jakarta Timur terhadap pemahaman penyandang disabilitas tentang pemilu 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah Menentukan efektivitas pendidikan politik KPU di Jakarta Timur serta untuk mengetahui pemahaman pendidikan politik yang dilakukan KPU Jakarta Timur terhadap warga panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa II. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakanyaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakanadalah teori efektifitas program dan pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di PSBL II menjadi efektif jika dinilai menggunakan teori Campbell J.P. yang terdiri dari 4 indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Kata Kunci: Efektifitas. Pendidikan Politik, KPU Jakarta Timur, PSBL

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana perwakilan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan. Inti dari sistem demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan dari sistem pemerintahan mayoritas adalah agar otoritas publik suatu negara dapat menerapkan pengaruh dan kekuatan penduduknya terhadap negaranya. Pemerintahan yang mempunyai andil besar dalam kekuasaan memegang peranan utama dalam penyampaian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya dalam perspektif trias politica), yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari perorangan hendaknya juga dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa publik dan bantuan pemerintah untuk perorangan. Pemilu sebagai sarana demokrasi telah digunakan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dalam hal ini masyarakat dapat memilih pemimpin yang diharapkan atau dianggap mampu menjalankan prinsip-

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexe



SINTA 5

PKP|INDEX



prinsip dasar negara yang menganut sistem demokrasi, oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Caesar2022).

Terkait pemilu, untuk menjadi negara demokratis diperlukan peran masyarakat yaitu ikut serta dalam pemilu itu sendiri. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan memperluas informasi mengenai mekanisme dan syarat mengikuti pemilu. Pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilusera meningkatkan partisipasi pemilih. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sosialisasi di beberapa tempat, baik yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, maupun lembaga terkait pemilu.

Pendidikan politik merupakan upaya sadar untuk memperluas pemahaman politik individu terhadap kualitas-kualitas yang terkandung dalam kerangka politik ideal yang akan dibangun (Alfian, 1981). Untuk membangun masyarakat yang demokratis dan responsif, pendidikan politik sangatlah penting. Melalui instruksi politik, masyarakat dapat memahami cara kerja pemerintah dan bagaimana pilihan politik diambil. Selain itu, pendidikan politik juga membantu masyarakat dalam memahami kebebasan dan komitmen warga serta menjadi lebih dinamis dalam dukungan politik. Yang dimaksud dengan “partisipasi politik” adalah proses dimana individu memposisikan dirinya sebagai warga negara (pemilih) dan bukan sebagai politisi yang baru terpilih untuk mengambil keputusan yang jujur dan adil guna meningkatkan stabilitas negara. Sebagai upaya untuk mengubah investasi politik, pentingnya pengambilan keputusan juga penting untuk mengatur rancangan kekuasaan skala penuh agar lebih mudah menjamin berfungsinya sistem check and balance antara organisasi-organisasi politik di tingkat fokus. Pelatihan politik dapat dilakukan bagi siapa saja, bahkan bagi penyandang disabilitas sekalipun mempunyai hak dan komitmen untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu keputusan.

Di Jakarta Timur sendiri pemilih oleh penyandang disabilitas Tahun 2019 sebesar 2.858 rincian nya 504 tunadaksa, 258 Tunanetra, 295 Tunarungu, 1.434 tunagrahita , 458 disabilitas lain nya (Aditya, 2019). Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan dengan pilkada 2017 yang hanya berjumlah 2.766 .Peningkatan jumlah tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat mulai meningkat bahkan bagi penyandang disabilitas khusus daerah Jakarta Timur. Peran penting KPU dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi agar tercapai dengan baik bisa terjadi asal setiap masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya.

Salah satu tugas yang telah dilakukan KPU Jakarta Timur dalam menerapkansosialisasi pemilu khususnya dalam pemilu 2024 yaitu melakukan sosialisasi diberbagai tempat seperti sekolah, universitas, komunitas dan lain sebagainya. Salah satu tempat yang dikunjungi KPU Kota Jakarta Timur yaitu di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung. Sosialisasi dari KPU harus diselesaikan agar warga penyandang disabilitas mental ingat bagaimana mereka memanfaatkan hak demokratis mereka dalam mengambil keputusan. Penyandang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan pemilih lainnya, hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, selama mereka berstatus warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan memiliki hak pilih sesuai KTP, mereka tidak kehilangan haknya untuk terdaftar sebagai pemilih. KPU Jakarta Timur menyiapkan tiga TPS khusus di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 untuk 1.000 penyandang disabilitas saat itu.

METODE

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif (*Qualitative research*). Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisa fenomena, peristiwa, Aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Metode kualitatif ini dipakai karena beberapa alasan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Pola deskriptif eksploratif diperlukan pada penelitian ini. Dengan kata lain bertujuan untuk menjelaskan situasi atau keadaan suatu fenomena. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pola deskriptif eksploratif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexe



SINTA 5

PKPINDEX



mendapatkan sumber pertama yaitu dengan menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih detil, maka dilakukan wawancara kepada narasumber (informan) terhadap anggota KPU Jakarta Timur dan penyandang disabilitas panti sosial Bina Asih. Beberapa gambaran data yang dibutuhkan peneliti seperti jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di panti sosial bina laras sentosa II, dan tanggapan para peserta ketika KPU Jakarta Timur melakukan sosialisasi sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari literatur buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk memperoleh data terkait teori, tinjauan pustaka, data penambah argumen, dan lain-lain untuk melengkapi penelitian ini.

PEMBAHASAN

Metode oleh KPU Terhadap Penyandang Disabilitas

Pendidikan politik adalah gerakan yang berencana membimbing dan mendorong arah politik dalam masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun informasi individu agar dapat mengambil bagian secara ideal dalam kerangka politik. Sesuai dengan pemahaman kekuasaan umum atau pemerintahan mayoritas, individu harus mempunyai pilihan untuk menyelesaikan kewajiban kerjasamanya (Rusadi, 2004). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

KPU Jakarta Timur sendiri sebagai salah satu penyelenggara pemilu menjalankan salah satu tugasnya yaitu kegiatan sosialisasi pendidikan politik/pemilih penyandang disabilitas di PSBL di Jakarta Timur. Sosialisasi ini dilakukan melalui ceramah yang disampaikan oleh Ketua KPU Jakarta Timur ibu Tri Endangningsih. Ceramah yang disampaikan berfokus kepada memberikan pemahaman pemilu kepada para peserta dengan materi yang telah disiapkan oleh KPU Jakarta Timur, Upaya sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas mental di fasilitas pelayanan sosial dilakukan beberapa kali sebelum kertas suara dihitung. Mekanisme penghitungan lembar suara dan materi pemungutan suara bagi pemilih penyandang disabilitas intelektual pada dasarnya sama dengan pemilih lainnya, namun perlakuannya berbeda. Memberikan informasi pemilu kepada mereka memerlukan pendekatan khusus untuk agar mereka memahami arti pemilu kepada mereka. Untuk informasi mengenai cara menyampaikan komunikasi terkait pemilu, Pada tahap ini, petugas KPU Jakarta Timur akan menggunakan media visual untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga dengan menampilkan foto dan contoh nyata seperti surat suara dan foto peserta pemilu. Di akhir sosialisasi, petugas KPU Jakarta Timur mengadakan kuis seputar materi sosialisasi untuk mengingatkan mereka kembali mengenai hal-hal seputar pemilu.

Memberikan sosialisasi tentang partisipasi politik itu seperti apa dengan menjelaskan bahwa partisipasi politik sama halnya kegiatan seseorang/sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jangan memilih pimpinan negara dengan cara langsung. Kemudian KPU Jakarta Timur menggambarkan seseorang pemimpin dalam suatu organisasi akan mengurus organisasi tersebut sehingga berjalannya atau tidak suatu organisasi tergantung kepada seorang pemimpinnya sama halnya dengan para pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya.

Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di PSBL

Panti sosial adalah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu arah atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penulis melaksanakan praktikum di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2. Sejarah berdirinya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bermula pada tahun 1972, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor CA 6/131972, sebagai Panti yang menampung gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai tempat mempersiapkan calon-calon transmigran. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 736/1996, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pantipanti Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, terjadi perubahan sasaran Warga Binaan Sosial (WBS) menjadi tempat penampungan penderita

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexe



SINTA 5

PKPINDEX



gangguan jiwa (psikotik terlantar), dengan kapasitas 700 orang dengan nama Sasana Bina Laras Harapan Sentosa 2 yang berada di bawah naungan PSBL HS 1. Sejalan dengan era globalisasi yang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan akibat berbagai tekanan ekonomi sosial dan ekonomi.

Efektifitas Metode Sosialisasi Politik Kepada Penyandang Disabilitas

Efektivitas pendidikan politik mengacu pada sejauh mana pendidikan politik berhasil mencapai tujuannya. Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik individu serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Efektivitas pendidikan politik dapat diukur dari beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman politik, partisipasi politik, dan perubahan perilaku politik yang disebabkan oleh pendidikan politik. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan proses pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman isu-isu politik, struktur pemerintahan, hak dan tanggung jawab warganegara serta partisipasi dalam kehidupan politik.

Efektivitas pendidikan politik mengacu pada sejauh mana pendidikan politik berhasil mencapai tujuannya. Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik individu serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Efektivitas pendidikan politik dapat diukur dari beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman politik, partisipasi politik, dan perubahan perilaku politik yang disebabkan oleh pendidikan politik. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan proses pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman isu-isu politik, struktur pemerintahan, hak dan tanggung jawab warganegara serta partisipasi dalam kehidupan politik.

Keberhasilan Program, Keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan. KPU Jakarta Timur memiliki tujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat, sehingga dengan tujuan tersebut KPU Jakarta Timur melakukan sosialisasi di PSBL mengenai pemilu khususnya. Kegiatan yang digagas ini merupakan hasil kerja sama antara KPU Jakarta Timur dan PSBL mengingat tahun 2019 pemilih disabilitas di Jakarta Timur paling tinggi selama pemilu dilakukan sehingga diharapkan di 2024 pemilih disabilitas dapat meningkat lebih lagi. Ibu Tri Endraningsih selaku anggota KPU Jakarta Timur menyampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari visi misi KPU sendiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagaimana kita ketahui 2019 pemilih kita dari penyandang disabilitas sangat tinggi dan kami mengharapkan bisa meningkat lebih lagi di 2024 maka dari itu kami melakukan sosialisasi di PSBL ini.

Keberhasilan program merupakan ukuran efektivitas dalam mencapai suatu tujuan. Keberhasilan program memerlukan pertimbangan tidak hanya terhadap tujuan program, tetapi juga mekanisme untuk mempertahankan tujuan dengan memperhatikan aspek outcome. Artinya, Anda dapat mengukur efektivitas. Sejauh mana tingkat hasil kebijakan dan prosedur dari program tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan? Dalam keberhasilan sasaran kegiatan sosialisasi pemilu dapat berjalan dengan baik sebab KPU memberikan konsep sosialisasi yang dapat dijangkau dan diketahui oleh para peserta. Selama pelaksanaan sosialisasi terlihat warga binaan sudah mampu berinteraksi dengan KPU sehingga peserta mampu memahami apa yang disampaikan KPU selama sosialisasi berlangsung, ini dapat dilihat dari Penerapan logistik yang telah dilakukan KPU memberikan dampak yang signifikan sehingga mengetahui bentuk surat suara pemilu 2024. KPU Jakarta Timur menyiapkan bagan logistik sebagai bentuk gambaran agar peserta mengetahui apa yang harus disiapkan dan langkah-langkah cara memilih nantinya. Dalam pelaksanaannya, peserta sosialisasi mampu menggambarkan logistik bentuk surat pada saat pemilu nanti,

Kepuasan terhadap program adalah proporsi kelayakan yang menunjukkan apakah suatu program berhasil dalam memenuhi kebutuhan klien. Klien senang dengan kualitas produk atau layanan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

dibuat. Semakin tinggi kualitas barang dan jasa yang diberikan maka nasabah akan semakin terpuaskan sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi yayasan. Untuk situasi ini, pemenuhan program diperoleh dari anggota sosialisasi di PSBL yang dipimpin oleh KPU Jakarta Timur dan dapat diperkirakan melalui wawancara yang diarahkan oleh para ilmuwan dengan beberapa anggota sosialisasi. Sejak menyelesaikan gerakan ini, beberapa anggota telah memperoleh pemahaman tentang sistem ras politik KPU Jakarta Timur setelah melakukan sosialisasi mendapatkan respon yang baik dari warga binaan dan menjadikan program tersebut kedalam bentuk pelaksanaan visi misi KPU yang sudah terlaksana dengan memuaskan.

Percapainya tujuan secara keseluruhan dapat diukur dari sejauh mana organisasi mampu melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pencapaian tujuan diukur berdasarkan penilaian efektivitas program secara keseluruhan. Dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan program pendidikan politik di PSBL II pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat relatif. Setiap pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai sejauh mana program tersebut dapat berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi terhadap sesama. Karena partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang didapatkan melalui sosialisasi di atas yang dilakukan KPU Jakarta Timur di PSBL II proses rangkaian pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Jakarta Timur di PSBL II sangat berdampak kurang baik bagi binaan setempat. Melihat dari antusias dari pemilu 2019 ditambah dengan penambahan binaan baru membuat pemilih di PSBL II akan bertambah partisipasi pemilihnya di tahun 2024, Seharusnya dengan Pengetahuan Pemilu yang dilakukan PSBL yang dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial DKI Jakarta pada saat itu sudah dapat memahami tentang pengertian pemilu secara keseluruhan bagi warga PSBL yang pernah mengikuti Sosialisasi KPU Jakarta Timur sebelumnya. Setelah dilakukan wawancara mereka sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya baik yang dilakukan di Jakarta atau diluar Jakarta. Dengan demikian hasil dari sosialisasi waktu itu memperkuat dan memperluas daya ingat para peserta terkait pemilu yang akan datang di 2024. Tetapi partisipasi politik para warga PSBL secara keseluruhan belum berdampak baik pada saat ini, karena berbagai macam faktor masih perlu di perhatikan seperti adanya peran aktif para pembimbing di pantau untuk menjelaskan secara umum bagaimana warga PSBL tetap melakukan kegiatan politik, serta harus ada campur tangan pemerintah daerah untuk mengajak para warga PSBL tetap aktif di dalam politik itu sendiri.

REFERENSI

- Rusadi, U., O. (2023). edia Sosial sebagai Demokrasi Partisipatif yang Potensial. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 491-495.
- Achmad, Zainal Abidin . (2014). Perbandingan Sistem Pers. *Lutfansah Mediat*.
- Aditya, R. (2019,38). *Kompas*. Retrieved from kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/08/11191601/2858-penyandang-disabilitas-di-jakarta-timur-akan-ikut-pemilu-2019>
- Adiyono, H. &. (2022). Unsur-Unsur Penting Penilaian Objek Dalam Evaluasi Hasil Belajar. . *Educational Journal : General and Spesific Reserarch*, 160-167.
- Agustar. (2022, april 26). *Hindari Salah Penerapan Hukum di Pemilu Serentak2024, Bagja Minta Penyelenggara Pemilu Kuasai Aturan UU Pemilu danUU Pilkada*. Retrieved from bawaslu <https://bawaslu.go.id/id/berita/hindari-salah-penerapan-hukum-di-pemilu-serentak-2024-bagja-minta-penyelenggara-pemilu-kuasai>
- Akmal, A. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun2019. *Jurnal Al-dustur*, 137-160. Retrieved from Jurnal Al-dustur.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 4 Juni 2024

- Annur, C. M. (2022, 9 26). *Penduduk Bekerja di Jakarta Didominasi Lulusan SMA*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/26/penduduk-bekerja-di-jakarta-didominasi-lulusan-sma>
- Argawati, U. (2022, Desember 11). *MKRI Humas*. Retrieved from Pemilu Secara Serentak Bertujuan Menguatkan Sistem Presidensial: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772%20Pendudukan%20dan,17.36%205%20jiwa%20Fkm%20C2%B2>.
- BPS. (2022, 4 3). *BPS Jakarta Selatan*. Retrieved from BPS: <https://jakselkota.bps.go.id/>
- BPS. (n.d.). *BPS Jakarta Utara*. Retrieved from Luas Geografis Jakarta Utara: <https://jakutkota.bps.go.id/indicator/101/204/1/jumlah-pegawai-kota-administrasi-jakarta-utara-menurut-jenis-kepegawaian.html>
- BPS Jakarta Utara*. (2022, 3 25). Retrieved from Geografis Jakarta Utara: <https://jakselkota.bps.go.id/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. In *Humanika*, Kajian Mata Kuliah Umum (pp. 33-54).
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *John Rawls' Theory of Justice*, 135-149.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi. urnal SosialPolitik*, 1.1: 5-16.
- fauzi, a. (2021, 12 1). *Jakarta Timur Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan*. Retrieved from tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1534424/jakarta-timur-lanjutkan-penataan-rw-kumuh-tahun-depan>
- Haboddin, M. (2017). *memahami Kekuasaan Politik*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Halim, R. (2016.). partisipasi politik masyarakat . *teori dan politik* .
- Hanafi. (2014). Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia: Catatan penting bagi partai politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 1- 16.
- Moento, P. A. (2010). kesuksesan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019. *politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 35-47.
- MS, T. (2018). Sosialisasi politik virtual dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018: studi sosialisasi politik pada pemilih millennial melalui media sosial. *Doctor Dissertation UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Nelson, H. (1997). No easy choice: Political participation in developing.
- Prabowo. (2000). Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi. *Himpunan Fisika Indonesia*, 4-5.
- Primadi, A., Efendi, D. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 63-73.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id